



## **Analisis Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam di Jerman**

**Satri Handayani<sup>1</sup>, Afriza Rahma Rani<sup>2</sup>**

Program Studi Pendidikan Agama Islam<sup>1</sup>, Pendidikan Guru Sekolah Dasar<sup>2</sup>  
STAI Diniyah Pekanbaru<sup>1</sup>, Universitas Pahlawan<sup>2</sup>

e-mail: [satri@diniyah.ac.id](mailto:satri@diniyah.ac.id), [afrizarahmaranii@gmail.com](mailto:afrizarahmaranii@gmail.com)

### **Abstrak**

Negara Jerman menganggap pendidikan adalah sebagai modal utama untuk membangkitkan masyarakatnya dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi, dengan pendidikan bisa merubah pola pikir masyarakat yang tinggal di negaranya sehingga bisa maju dan berkembang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pendidikan dan Implementasinya terhadap Pendidikan Islam di Jerman. Adapun metode penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu dengan mengumpulkan data dari artikel-artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam di Jerman. Adapun kebijakan Pendidikan Islam di Jerman dua diantaranya adalah Konstitusi Jerman memberi hak para orang tua untuk mendidik anak mereka sesuai tradisi agama yang diikuti. Untuk mempertahankan netralitas agama, negara bertanggung jawab menyediakan ruang bagi pengajaran agama, karena negara sendiri dilarang mencampuri urusan agama dan sekulerisme merupakan prinsip utama Jerman, kedua pelajaran agama Islam sudah menjadi mata pelajaran pilihan di sembilan dari enam belas negara bagian Jerman, artinya dapat disimpulkan negara Jerman sudah memperhatikan Pendidikan Islam di negaranya.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Pendidikan, Islam, Jerman*

### **Abstract**

Germany considers education as capital. The main thing is to raise the community from economic downturn and ideological decline, with education it can change the mindset of the people who live in their country so that they can progress and develop. This paper aims to determine the education policy and its implementation towards Islamic education in Germany. The method of writing this research uses library research methods, namely by collecting data from articles and books related to the Analysis of Educational Policy and Its Implementation Against Islamic Education in Germany. Two of the policies on Islamic education in Germany are the German Constitution which gives parents the right to educate their children according to the religious traditions they follow. To maintain religious neutrality, the state is responsible for providing space for religious teaching, because the state itself is prohibited from interfering in religious affairs and secularism is Germany's main principle, both Islamic religious studies have become elective subjects in nine out of sixteen German states, meaning that the state can conclude Germany has paid attention to Islamic education in its country.

**Keywords:** *Policy, Education, Islam, Germany*

## PENDAHULUAN

Jerman merupakan suatu negara yang berbentuk federasi yang terletak di Eropa Barat. Federasi yang terdiri dari 16 negara, dimana masing-masing negara yang memiliki tanggung jawab individu untuk pendidikan. Jerman termasuk salah satu negara maju di dunia dengan kemajuan teknologi dan ekonomi yang mapan. Luas wilayahnya mencapai 357.021 kilo meter persegi (kira-kira dua setengah kali pulau Jawa dengan penduduk sekitar 82 juta jiwa, negara dengan 16 negara bagian ini menjadi anggota kunci organisasi negara Uni Eropa. Jerman juga menjadi negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia.

Keberadaan orang-orang Islam pertama kali di negeri Jerman, tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17 yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika fase bangkitnya industri di Eropa, banyak warga Muslim dari Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan ke Eropa termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965 orang-orang dari Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan pemerintah Jerman sendiri dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga Muslim dari Libanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, Irak dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka di landa konflik. Jerman sebagai negara maju menjadi target bisnis dan pendidikan banyak pihak. Para profesional, pebisnis, pekerja dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan dan Asia Tenggara datang dan menetap di sana.

Pada perkembangan terakhir, negara Jerman mulai memperbolehkan pelajaran agama Islam, bagi para pelajar muslim di sekolah-sekolah umum. Biasanya pelajaran agama dilakukan orang-orang Islam secara non formal di masjid-masjid atau kelompok-kelompok masyarakat. Kebijakan baru yang merupakan hasil dari penggodokan bersama antara pemerintah Jerman dan komunitas muslim di Jerman ini adalah salah satu upaya mendukung proses integrasi sosial muslim di Jerman. Menurut Wolfgang Schrauber, menteri dalam negeri Jerman, kebijakan tersebut dapat menjembatani perbedaan yang kerap timbul. Bahkan dalam perguruan tinggi di Jerman, pengembangan studi Islam di Jerman merupakan bagian penting yang bertujuan agar teologi Islam dapat membangun masyarakat yang profesional.

Ketidak tersediaan infrastruktur keagamaan formal di Jerman menjadikan masjid-mesjid di Jerman memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan komunitas muslim. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat pendidikan/pengajaran, pertemuan sosial keagamaan, acara perkawinan, dan pusat bisnis. Karenanya tidak sedikit masjid yang memiliki toko, restoran, perpusakaan, dan ruang pertemuan. Saat ini jumlah masjid di Jerman berkisar 2000, namun sebagian besar tidak dalam bentuknya yang umum, melainkan ruko-ruko berbeda dekat pusat bisnis dan perumahan kaum muslim. Tuntutan kaum muslimin untuk membangun masjid dalam bentuknya yang umum

selalu kandas di tingkat parlemen setempat. Namun sejak tahun 1990- an, banyak mesjid yang utuh dan megah dibangun. Satu laporan menyebut sekitar 200 telah terbangun dan lebih dari 30 dalam proses pembangunan.

## **METODE**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu dengan mengumpulkan data dari artikel-artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam di Jerman. Metode Analisis yang digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah bentuk analisis yang berupa penjelasan dan mengeksplorasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas.

Analisis data secara kuantitatif dilakukan pada data hasil tes membaca pemahaman yang berupa angka atau nomerik, sedangkan analisis data secara kualitatif dilakukan pada data hasil nontes yakni hasil dari data pengamatan (observasi) terhadap aktivitas guru dan siswa saat proses pembelajaran membaca pemahaman dan data hasil dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pendidikan Islam di Jerman**

Kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II membuat perubahan besar dalam kehidupan bangsa Jerman, termasuk pada perubahan filsafat yang dijadikan landasan bagi pembangunan system pendidikan. Berbagai kondisi buruk yang terjadi pasca kekalahan, termasuk terbagi duanya negara Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, menjadi awal bagi bangsa Jerman untuk mereformulasi ulang landasan falsafi yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa kebijakan system pendidikan Jerman yang khas.

- a) Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari *Kindergarten* sampai tingkat pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah Jerman juga mengalokasikan dana yang relatif besar bagi penyediaan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik.
- b) Pemerintah federal/pemerintah pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan negara bagian. Pembagian kewenangan ini mengarah kepada upaya untuk tidak menumpulkan kekuasaan di satu pundak, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau pengambilan kebijakan pendidikan yang lemah, tidak akan berimbas secara global. Di sisi lain, keuntungan pembagian kewenangan ini memberikan kesempatan bagi pengembangan dan

pemanfaatan potensi daerah, namun untuk menciptakan standarisasi nasional, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk meregulasi beberapa hal dalam sistem pendidikan Jerman.

- c) Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar. Dibandingkan dengan Indonesia, partisipasi masyarakat Jerman jauh lebih terlihat. Hal ini mencerminkan pemikulan tanggung jawab bersama dan rasa kesatuan antara pemerintah dengan masyarakatnya.
- d) Setelah *Wiedervereinigung* atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah dengan memberikan alokasi anggaran belanja negara yang lebih proporsional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur. Pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah negeri merupakan kebijakan yang pada gilirannya akan menghilangkan potensi permasalahan di masadepan.
- e) Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Rasanya orang Jerman akan menjadi sangat prihatin atau bahkan mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa di Indonesia masih ada guru yang *nyambil* menjadi tukang ojek karena kelemahan finansial yang dimilikinya.

Umumnya semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran yang tinggi di antara para penggiat pendidikan, rasa tanggungjawab yang dimiliki semua elemen masyarakat dan pengawasan yang mapan.

Selain dari 4 kebijakan Pendidikan Pendidikan di Jerman di atas, berikut penulis uraikan kebijakan Pendidikan Pendidikan Islam di Jerman yang berhubungan dengan pendanaan, kurikulum dan guru Pendidikan agama Islam di Jerman :

- a) Pendanaan  
Sekolah dasar Muslim pertama Belanda dibuka di Rotterdam tahun 1998. Sekarang terdapat empat puluh tiga sekolah dasar Muslim dan satu sekolah menengah. Semua sekolah ini didanai negara dengan syarat harus memenuhi semua standar pendidikan. Negara mendanai pendidikan agama di sekolah umum sejak tahun 2008.
- b) Kurikulum  
Di Jerman memungkinkan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dalam kemitraan dengan komunitas agama yang diakui negara. Namun hanya terdapat 2 organisasi Muslim yang diakui. Salah satunya adalah *Alevi*, yang dipengaruhi Islam *Syi'ah*, Sufisme, dan Kristen

Nestorian. Meskipun pemerintah mengizinkan pendidikan agama di sekolah umum, tetapi hanya terdapat beberapa sekolah yang telah mencapai kesepakatan dengan organisasi Muslim resmi, karena sekolah Islam swasta dapat dibuka di Jerman sesuai konstitusi. PAI telah diselenggarakan di *Baden Wuttemberg, Bavaria, Schleswig Holstein, Rhineland Palatinate, North, Rhine Lower, dan Saxony Westphalia*. Di kota-kota ini, lebih banyak mengajarkan tentang budaya dan sejarah Islam. Menurut Sarikaya, alasan utamanya adalah tidak adanya komunitas Islam resmi yang diakui. Pemerintah Jerman mendanai empat Universitas yang menawarkan teologi Islam, yaitu: *Munster-Osnabruck, Frankfurt-Greissen, Tubingen, dan Nuremberg-Erlangen*. Para guru PAI menerima pelatihan di pusat-pusat ini. Banyak Muslim di Jerman merasa ambivalen tentang peran negara Jerman dalam PAI dan teologi Islam. Di sisi lain, para orang tua puas bahwa anak-anak Muslim memiliki pilihan untuk belajar tentang Islam di sekolah. Kementerian Pendidikan di Jerman, telah menyatakan bahwa ingin menutup kesenjangan akademis dan memungkinkan pendekatan historis-kritis terhadap Al-Qur'an. Selain itu, guru Muslimah diperbolehkan mengenakan jilbab di sekolah, ketika sedang mengajar PAI. Mayoritas yang mempelajari teologi Islam di Jerman adalah wanita Muslimah yang mengenakan jilbab.

## 2. Implementasi Pendidikan Islam di Jerman

Implementasi Pendidikan Islam di Jerman mulai dimasukkan kedalam system pendidikan di sekolah umum. Meski mendapat pertentangan dari beberapa pihak, namun kelas-kelas Islam telah berkembang pesat di banyak negara bagian Jerman.

- a. Kelas Islam telah diluncurkan sejak tahun 2000  
kelas-kelas Islam mulai diluncurkan pada awal tahun 2000 dan sekarang sudah diajarkan di 800 sekolah dasar dan menengah. Pelajaran agama Islam sudah menjadi mata pelajaran pilihan di sembilan dari enam belas negara bagian Jerman. Beberapa topik yang dibahas dalam bidang studi ini di antaranya tentang Al-Quran, sejarah Islam, perbandingan agama dan etika keislaman.
- b. Sebanyak 54 ribu siswa telah menerima pelajaran agama Islam di sekolah  
Tujuan yang ditekankan dari kelas-kelas Islam adalah mencegah radikalisme. Seperti diketahui, sejak 2013, lebih dari 1.000 orang meninggalkan Jerman untuk bergabung dengan ISIS dan organisasi teroris lainnya, sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun.
- c. Kelas Islam diharapkan akan mengurangi perilaku diskriminatif  
Pada 2016, data statistik kependudukan menyebutkan bahwa warga muslim di Jerman berjumlah 4,95 juta atau 6,1 persen dari total penduduk Jerman. Ini sekaligus menjadikan Jerman sebagai negara dengan populasi muslim kedua terbesar di Uni Eropa setelah Perancis.
- d. Kelas Islam dapat wujudkan integrasi budaya Islam dan Jerman

Pada tahun 2017 terjadi penolakan besar terhadap Islam di Jerman. Kampanye “*Stop Islamisasi*” sempat membuat warga muslim Jerman gelisah, bahkan di poster-poster tertulis “sekolah-sekolah bebas Islam”. Aksi penolakan terhadap Islam tidak berhenti di situ saja. Awal tahun 2018, politisi lokal Jerman membahas larangan jilbab. Namun, sebagian politisi lain justru mendorong ekspansi kelas-kelas Islam di sekolah-sekolah umum. Mereka beranggapan bahwa kelas-kelas Islam akan mewujudkan integrasi budaya Islam dan Jerman.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari tuisan kebijakan Pendidikan dan implementasinya terhadap Pendidikan Islam di Jerman adalah Negara Jerman memberikan dukungan pendanaan kepada sekolah Islam, memberikan pelajaran agama Islam ke sekolah-sekolah umum, yang sampai sekarang menjangkau 800 sekolah dasar dan menengah, Jerman tidak menyediakan pendidikan guru PAI secara khusus dan memberikan kesempatan kepada guru Islam untuk mengambil kuliah teologi Islam, Ini mengindikasikan bahwa pembelajaran PAI lebih mengarah pada kajian historis tentang Islam daripada substansi PAI itu sendiri. Negara Jerman mengharuskan guru memiliki kemampuan profesional yang menggabungkan antara kemampuan akademik dan kemampuan pedagogis, meskipun tempat pelatihan mereka berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cecep Wahyu Hoerudin, Rochmat Tri Sudrajat, Setiawan. “Studi Pendidikan Mancanegara Jerman dan Indonesia.” Bandung, 2009.
- Jamil, Irpan, and Ozi Setiadi. “Politik Identitas Muslim Di Jerman Dan Perancis.” *Politea* 2, no. 2 (2019): 135. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5699>.
- Kholis, Nur, and Tatag Satria Praja. “Kebijakan Eropa Terhadap Pendanaan, Kurikulum, Dan Guru Sekolah Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 1 (2019): 19–36. <https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.19-36>.
- Nabel, Muhammad. “Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries.” *Journal of Social Science and Humanities Research* 3, 2005.
- Sarikaya, Yasar. *Islamic Religious Education in Germany: Curriculum and Textbooks*. Frankfurt: Peter Lang, 2011.
- Schreiner, Peter. “Religious Education in Germany,” in *Religious Education in Europe: Situation and Current Trends in Schools*. Oslo: IKO - Publishing House, 2007.
- . “Religious Education in the European Context.” In *Issues in Religious Education*, by Lynne Broadbent and Alan Brown, 87. New York: Routledge, 2002.
- Septa, Andes. “800 Sekolah Umum Di Jerman Buka Kelas Agama Islam,” 2018. <https://www.idntimes.com/news/world/andes-3/800-sekolah-umum-di->

jerman-buka-kelas-agama-islam-c1c2-1/2.